PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN SEBAGAI ALTERNATIF PEREKONOMIAN LOKAL

Emil Salim Siregar¹, Apriola Dwi Indra Swary², Dea Resti Piranda³, Jihan Salsabila⁴,
Rafly Aulia Lubis⁵, Rizky Sinaga⁶

emielsalimsrg1988@gmail.com¹, apriolladwiindraswary@gmail.com², dearestipiranda9@gmail.com³,
jihansalsa0103@gmail.com⁴, raflyaulialubis@gmail.com⁵, rizkyoppo920@gmail.com⁶

Universitas Asahan

Abstrak: Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Perikanan Tangkap, Faktor Pendukung dan Penghambat dan untuk mengetahui Dampak dari Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Perikanan. Pada artikel ini, penyusun Menggunakan penelitian kuantitatif kausalitas. Dan Penyusun mengumpulkan berbagai bahan-bahan atau beberapa materi yang bersumber dari buku, jurnal, internet dan berbagai sumber lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik dan bagaimana sanksi pidannya. menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap yaitu sebagai entrepreneur yaitu sebagai pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi, sebagai koordinator yaitu mengkoordinir semua lembaga termasuk stakeholders, sebagai fasilitator yaitu memberi bantuan seperti alat tangkap dan alat pengolah pengusaha perikanan, sebagaistimulator yaitu dalam mempercepat pengembangan ekonomi melalui pameran pengolah hasil perikanan.

Kata Kunci: Hasil Perikanan, Peran Pemerintah, Ekonomi.

Abstract: The Role of Local Government in Improving Local Economic Development Through the Capture Fisheries Sector, Supporting and Inhibiting Factors and to determine the Impact of Local Economic Development Through Fisheries. In this article, the author uses quantitative research on causality. And the compiler collects various materials or some materials sourced from books, journals, the internet and various other sources. This article aims to find out how the legal arrangements for medical personnel who commit malpractice and how the criminal sanctions are. shows that the role of local governments in improving local economic development through the capture fisheries sector is as entrepreneurs, namely as human resource development through training and socialization, As a coordinator, namely coordinating all institutions including stakeholders, as a facilitator, namely providing assistance such as fishing gear and processing equipment for fishery entrepreneurs, as a stimulator, namely in accelerating economic development through exhibitions of fishery product processors.

Keyword: Fisheries Products, Government Role, Economy.

PENDAHULUAN

Di suatu negara berkembang, termasuk di negara Indonesia ini, pembangunan sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat. Paradigma pembangunan berkelanjutan menggambarkan pembangunan melalui elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai bagian dari suatu negara, warganya menaruh banyak harapan pada negara. Karena kepentingan mereka beragam dan berubah-ubah, negara diharapkan untuk memenuhi kepentingan warganya. Menurut Hayat (2018), negara harus mengidentifikasi masalah masyarakat dan menyelesaikannya. Aspek ekonomi sangat penting di negara berkembang karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Di era sekarang ini, pemerintah daerah seharusnya berperan aktif dalam program pembangunan daerah, salah satunya strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu dengan menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi lokal merupakan cara untuk mensejahterakan masyarakat karena dengan pengembangan ekonomi local semua sektor terutama pada pemerintah daerah dan masyarakat bekerjasama untuk mengelola potensi daerah supaya bisa bermanfaat. Pembangunan ekonomi lokal adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi yang baru, pembentukan industri alternatif, perbaikan kapasitas untuk menghasilkan produk dan jasa supaya lebih baik, indentifikasi pasar, ahli ilmu pengetahuan serta peningkatan perusahaan yang baru dengan bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan peluang kerja bagi masyarakat daerah.

Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, pemerintah memberikan otonomi daerah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan Pembangunan sebagaimana telah diubah menjadi Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014, daerah memiliki banyak wewenang untuk mengatur diri mereka sendiri, dengan pemerintah pusat sedikit campur tangan. Sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang sedang berkembang. Perencanaan pembangunan daerah dibuat oleh pemerintah pusat karena mereka tidak memiliki banyak sumber daya dan sangat membutuhkan peran pemerintah daerah. Menurut Hayat (2014), kualitas sumber daya aparatur memengaruhi kinerja pelayanan, dan kemampuan dan kualitas sumber daya yang dimiliki memengaruhi kinerja yang dilakukan. Selain itu, tanggung jawab dan kemampuan harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pelayanan. Sehingga kebijakan akan berdampak positif terhadap pelayanan yang diberikan.⁴ Menurut Arsyad (1999), pemerintah daerah melakukan empat hal untuk meningkatkan potensi sumber daya daerahnya, antara lain:

- 1) Entrepreneur, yaitu pengelolaan sumberdaya daerah,
- 2) Koordinator yaitu pembuat kebijakan,
- 3) Fasilitator yaitu sebagai peningkatan potensi sumberdaya,
- 4) Stimulator yaitu percepatan pembangunan.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang dibagi menjadi beberapa pulau yang terpisah oleh perairan dan daratan. Pulau-pulau ini merupakan kesatuan wilayah, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar. Masyarakat yang tinggal di dekat laut disebut masyarakat pesisir, dan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan. Oleh sebab itu didalam artikel ini akan membahas mengenai pengembangam budidaya perikanan sebagai alternatif perekonomian lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan kajian Library Research (penelitian kepustakaan). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan

tulisan-tulisan yang mengarah pada pembahasan.⁶ Sedangkan Penelitian kepustakaan (Library Research) adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

HADIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Budidaya Ikan

Budidaya ikan air tawar telah lama dikenal oleh masyarakat. Budidaya perikanan dalam arti sempit adalah usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup liar di alam menjadi ikan perairan. Pengertian secara luas, yaitu semua usaha membesarkan dan mendapatkan ikan, baik ikan itu masih liar di alam atau sudah dibuatkan tempat tersendiri, dengan adanya campur tangan manusia. Budidaya tidak hanya memelihara ikan di kolam, tambak, sawah dan sebagainya namun secara luas juga mencakup kegiatan mengusahakan komoditas perikanan di waduk, sungai, atau laut.

Budidaya ikan merupakan suatu upaya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Budidaya merupakan bentuk campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perairan.¹⁰ Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memproduksi ikan dalam suatu wadah atau media terkontrol dan berorientasi pada keuntungan. Pengertian tersebut menitik beratkan peran manusia dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas perairan khususnya ikan air tawar dan bertujuan mencari keuntungan. Harapannya, produk yang dihasilkan akan berlipat dan berlimpah. Kegiatan perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran, dan dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan, menurut UU RI No.9/1985 dan UU RI No.31/2004. Akibatnya, perikanan dapat dianggap sebagai bisnis agribisnis. Perikanan pada umumnya dilakukan untuk kepentingan penyediaan pangan manusia.

2. Tujuan Budidaya Ikan

Tujuan budidaya perikanan adalah untuk mencapai produksi perikanan yang lebih baik atau lebih banyak dibandingkan dengan hasil ikan yang hidup di alam liar. Untuk mencapai tujuan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha budidaya harus diperhatikan, seperti penyedia benih, pembuatan tempat pemeliharaan, pengairan, pakan dan pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Untuk dapat melaksanakan usaha budidaya ikan dengan baik, perlu diperhatikan beberapa ketentuan berikut:

- a. Pemeliharaan tempat dan kondisi lingkungan didasarkan pada jenis tanah, topografi, kualitas dan kuantitas air serta temperatur air
- b. Perencanaan usaha budidaya ikan meliputi ukuran unit usaha, penyediaan air, dan sistem pengeringan
- c. Perencanaan pembuatan kolam meliputi ukuran, bentuk, kedalaman, dan bahan yang digunakan
- d. Perencanaan metode budidaya didasarkan pada hal-hal seperti faktor ekonomi dan biologis, metode pengelolaan, dan rencana tahunan

3. Konsep Ekonomi Perikanan

Pembangunan perikanan nasional harus mencapai lima tujuan yaitu (1) Memenuhi permintaan domestik untuk produk perikanan, (2) Meningkatkan perolehan devisa, (3) Meningkatkan produksi perikanan sesuai dengan potensi lestari dan daya dukung lingkungan, (4) Mempertahankan kelestarian stok ikan dan daya dukung lingkungan, (5) Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi perikanan nasional, tentunya akan ada hambatan. Sampai saat ini, banyak masalah dalam pengelolaan pembangunan perikanan termasuk hambatan teknis yang berkaitan dengan kebijakan, elemen hukum dan kelembagaan, serta kebijakan ekonomi makro yang tidak mendukung pembangunan perikanan.

Di antara sektor pertanian yang lain, sektor perikanan adalah yang paling kompleks karena sifat sumber daya yang berubah-ubah dan batas-batasnya yang relatif besar. Akibatnya, pembangunan sektor perikanan membutuhkan pemikiran yang khusus.¹³

Seperti halnya sektor ekonomi lainnya, perikanan merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa. Sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbarui (renewable), pengelolaan sumber daya ini memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan hati-hati. Pada mulanya, pengelolaan sumber daya ini banyak didasarkan pada faktor biologis semata, dengan pendekatan yang disebut Maximum Sustainable Yield (tangkapan maksimum yang lestari) atau disingkat MSY. Dalam pendekatan ini menjelaskan bahwa setiap spesies

ikan memiliki kemampuan untuk memproduksi yang melebihi kapasitas produksi (surplus), sehingga apabila surplus ini dipanen (tidak lebih dan tidak kurang), maka stok ikan mampu bertahan secara berkesinambungan (sustainable). Dengan tercapainya tingkat MSY maka akan tercapai produksi yang maksimum secara ekonomi dan merupakan tingkat upaya yang optimal secara social.

Menurut Wangladi (2003), usaha perikanan dapat digambarkan sebagai kombinasi dari faktor produksi tradisional tenaga kerja dan barang modal atau apa pun yang dianggap sejenisnya. Ini tidak terbatas pada menangkap ikan secara langsung, tetapi mencakup semua usaha untuk mendapatkan hasil yang laku dijual.

4. Bagaimana Potensi Perikanan Lokal dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi perikanan lokal ialah sebagai berikut:

Pertama, pusat produksi khusus ikan lokal dibuat dengan dukungan teknologi budidaya dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. "Tugas UPT melakukan domestikasi ikan lokal sehingga akan mampu dikuasai proses produksi benihnya dan sistem produksinya untuk menunjang proses pembesaran dalam sistem budidaya."

Langkah berikutnya adalah pengembangan infrastruktur dan konektivitas. "Tentu saja kita kembangkan bersama kementerian dan lembaga yang lain di bawah pembinaan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dalam pengembangan perikanan budidaya. Kedepannya semua kementerian ataupun lembaga harus mendukung pengembangan perikanan budidaya, termasuk budidaya ikan lokal."

Selanjutnya, peningkatan produksi budidaya, terutama dalam hal penyediaan input produksi. Benih adalah salah satu input produksi yang sangat penting, jadi diperlukan penguatan-penguatan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR), jadi kita tidak akan mengeser UPR-UPR yang sudah ada, tapi menambahkan kegiatan UPR untuk memperkuat ikan lokal yang ada.

Selanjutnya, langkah keempat adalah manajemen kesehatan ikan dan lingkungan. Saat ini, budidaya ikan lokal belum menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Namun, budidaya ikan lokal harus dilakukan dengan Metode Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk mencegah penyakit masuk ke sistem budidaya.

Kelima, memperkuat bisnis yang bergantung pada akses pasar. "Saya rasa ikan lokal ini masih berbasis lokal karena permintaannya sangat tinggi, tetapi baru-baru ini Cina juga mulai meminati produk ikan lokal Indonesia seperti ikan gabus dan ikan lainnya.

Dan keenam, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK). "Disini kami memerlukan bantuan dari BRSDM KKP dan juga LIPI dan juga lembaga riset yang lain terkait kompetensi SDM dan pengembangan IPTEK khususnya untuk pengembangan ikan lokal yang belum kita ketahui dan sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat." untuk memungkinkan budidaya ikan.

Terakhir, langkah ketujuh, penguatan kelembagaan dan komitmen pihak berwenang, menjadi penting. Pihak berwenang di sini berarti bukan hanya pemerintah saja tetapi juga pihak swasta yang terlibat. Kita berharap perusahaan swasta tidak mengeksploitasi ikan lokal secara besar-besaran untuk tujuan industri, seperti yang terjadi dengan ikan gabus untuk produksi albumin. Banyak perusahaan yang meminta dukungan kami untuk mencegah eksploitasi ikan gabus dan ikan lokal lainnya.

Selain itu, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap mencakup: 1) sarana dan prasarana tangkap, seperti pembelian alat tangkap; 2) sumber daya manusia, seperti tempat tinggal dan sosialisasi nelayan; 3) bantuan permodalan, seperti menyediakan akses ke pinjaman modal untuk koperasi dan bank; dan 4) pemasaran, seperti menyediakan lokasi untuk penjualan produk sektor perikanan tangkap.

5. Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam pengembangan budidaya dalam pengembangan budidaya perikanan di Tingkat lokal.

Perikanan budidaya memiliki beberapa kekurangan, hambatan, dan masalah yang perlu diperhatikan, antara lain:

1) Ketergantungan pada Sumber Air

Budidaya ikan sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan air. Jika sumber air mengalami masalah, seperti kekeringan atau polusi, budidaya ikan dapat terganggu..

2) Gangguan Hama dan Penyakit

Penyakit dan hama seringkali menghalangi perikanan budidaya. Ikan yang tidak sehat dapat mengalami penurunan pertumbuhan atau kematian, yang berdampak pada penurunan produksi budidaya.

3) Keterbatasan Teknologi

Beberapa teknologi dalam perikanan budidaya masih terbatas atau mahal untuk diimplementasikan, seperti pengendalian otomatis, pengolahan limbah, dan monitoring lingkungan secara real-time.

4) Rendahnya Kualitas Bibit Ikan

Kemampuan budidaya ikan dapat dipengaruhi oleh kualitas bibit ikan yang buruk atau penyediaan bibit ikan yang sulit..

5) Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Bencana alam dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi budidaya seperti penyebaran penyakit, suhu air, dan ketersediaan pakan alami. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi dan kerugian keuangan.

KESIMPULAN

Pembudidayaan ikan dan makhluk akuatik lainnya dalam ruang yang terkontrol dikenal sebagai perikanan budidaya. Dalam budidaya perikanan, langkah-langkah utama yang perlu dilakukan adalah persiapan lahan, pembelian bibit ikan, pemberian pakan, dan pengawasan dan pemeliharaan. Perikanan budidaya memiliki banyak keuntungan, seperti memenuhi kebutuhan konsumsi, memiliki kontrol yang lebih baik, memiliki potensi pendapatan yang tinggi, dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Namun, perikanan budidaya juga memiliki kelemahan, hambatan, dan masalah yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah ketergantungan pada sumber air, penyakit dan hama yang mengganggu, dan perubahan iklim. Perikanan budidaya dapat menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan dengan pengelolaan yang baik dan perhatian terhadap masalah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Alisjahbana. (2012). *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Azis Nur, Dkk. 2021. *Buku ajar ekonomi perikanan*. Cetakan Pertama. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia

Cahyo Saparinto, *Panduan Lengkap Gurami*. (Jakarta: Swadaya, 2008) Hayat. (2018). *Kebijakan Publik, Evaluasi, Revormasi, Formulasi*.

Malang: Intrans Publishing.

Siregar, Y. I. (2015). *Menggal Potensi Sumber Daya Laut Indonesia*.

Medan: Universitas Sumatera Utara.

Jurnal :

Hayat (2014). *Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Bina Praja*.

Vol 6, No. 2.

Hendrik. (2010). Potensi Sumberdaya Perikanan dan Tingkat Eksploitasi. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 121-131.

Mohtar Rasyid. 2015. potensi ekonomi ikan dan produk perikanan indonesia dalam lingkup masyarakat ekonomi asean. Vol 1 No 1.

Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1).

Sishadiyati. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal di Kawasan Pesisir Kecamatan Bulak Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Vol 3: No. 2.

Siegers, W.H., Yudi, P., Annita, S. 2019. Pengaruh Kualitas Air Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila Nirwana (*Oreochromis sp.*) pada Tambak Payau. *The Journal of Fisheries Development*. 3 (2).

Skripsi:

Agus Arif Priyono. 2019. Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap (Studi di dinas perikanan dan kelautan kabupaten lamongan). Skripsi Universitas Islam Malang

Website:

Syifa. 2023. Kendala dan Permasalahan Perikanan Budidaya: Tantangan Menyebalkan dilautan peluang. URL: <https://takterlihat.com/kendala-dan-permasalahan-perikanan-budidaya/#:~:text=Kendala%20dan%20Permasalahan%20Perikana n%20Budidaya%3A%20Tantangan%20Menyebalkan%20di,Lingk ungan%20...%205%205.%20Pasar%20dan%20Ekonomi%20 Diakses 16 Januari 2024 Pukul 06.30 Wib>

Nainggolan, Ibrahim, Molengraaff, and Andasasmita. "Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan." *SiNTESa* 1, no. 1 (2021): 734–46. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/404>.

Permana, Dito, and Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 680–85.

Simabura, Charles. "Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila" *12* (2023): 383–404.

Sukma, Fajar Rahimi, and Agus Dimiyati. "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Illegal." *Hukum Responsif* 12, no. 1 (2021): 30–44. <https://doi.org/10.33603/responsif.v12i1.5028>.

Syafari, Muhammad Riduansyah, Trisylvana Azwari, Siti Juwairiyah, Program Studi, Ilmu Administrasi, and Universitas Lambung Mangkurat. "EMPOWERMENT OF FISHERY PRODUCTS PROCESSING GROUP IN BANJARMASIN CITY" 4, no. 2 (n.d.): 147–54. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v4i2.268>.

Towadi, Mellisa, Apriyanto A J Pauweni, Julius T Mandjo, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, et al. "Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah" 1 (2022): 99–107.